

DESAIN PROTEKSI SISTEM RUANG KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR: ADAPTASI FUNAYA-JEPANG BAGI SUKU BAJO-INDONESIA

ASNAEDI



**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Desain Proteksi Sistem Ruang Kehidupan Masyarakat Pesisir: Adaptasi Funaya-Jepang Bagi Suku Bajo-Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2025

Asnaedi
K1601202050

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

ASNAEDI. Desain Proteksi Sistem Ruang Kehidupan Masyarakat Pesisir: Adaptasi Funaya-Jepang Bagi Suku Bajo-Indonesia. Dibimbing oleh JOYO WINOTO, HARIANTO dan LINDA KARLINA SARI.

Hubungan manusia dengan alam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, termasuk masyarakat Bajo. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang sangat terkait dengan ekosistem laut. Masyarakat Bajo adalah salah satu contoh nyata dari hubungan adaptif manusia dengan lingkungan, di mana mereka hidup bergantung pada laut untuk tempat tinggal dan mata pencaharian. Pola hidup mereka mencerminkan adaptasi, interaksi, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, dengan berkembangnya industrialisasi dan modernisasi, muncul tantangan dalam mengelola ruang hidup masyarakat Bajo. Kebijakan nasional saat ini dominan berorientasi pada daratan, mengabaikan kearifan lokal mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kerangka hukum yang ada, termasuk UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (2), menegaskan bahwa kekayaan sumber daya merupakan milik negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat adat yang bermukim di wilayah perairan.

Pada era 1980-an hingga 1990-an, pemerintah mencoba merelokasi masyarakat Bajo ke daratan melalui program transmigrasi atau *resettlement*. Program ini tidak sepenuhnya berhasil karena tidak sesuai dengan budaya mereka, menciptakan risiko kehilangan identitas budaya, kesulitan adaptasi, dan marginalisasi. Pendekatan *top-down* tanpa partisipasi aktif masyarakat hanya memicu resistensi dan kurangnya rasa memiliki. Dalam menghadapi tantangan ini, keberlanjutan ruang hidup masyarakat Bajo di wilayah perairan menjadi harapan atau prioritas utama untuk menjaga identitas budaya. Tantangan meliputi degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana alam, dan penurunan kesejahteraan. Kebijakan yang tidak sejalan dengan tradisi mereka dan lemahnya pengakuan hak sebagai warga negara di perairan memperburuk situasi. Kerangka hukum nasional yang lebih berfokus pada daratan menciptakan kesenjangan dalam mengakomodasi keberlanjutan ruang hidup mereka. Tanpa desain proteksi yang mengakomodir kearifan lokal mereka, ruang hidup mereka terus menghadapi ancaman eksploitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model desain proteksi dan pengelolaan ruang hidup masyarakat Bajo yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *Rights, Restrictions, and Responsibilities (RRRs)* dengan konsep *Adaptive Governance* dan *Co-Management* dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pengakuan hak masyarakat Bajo, penerapan pembatasan guna melindungi ekosistem laut, serta pelaksanaan tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi nasional mempengaruhi pengakuan serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Bajo di wilayah perairan; (2) mengevaluasi kerangka hukum nasional terkait dengan

RRRs dan dampaknya terhadap kepatuhan serta hak masyarakat untuk tinggal dan mengambil hasil laut; serta (3) mengembangkan desain proteksi ruang kehidupan masyarakat Bajo yang mengadaptasi model Funaya di Jepang dengan penekanan pada pengakuan formal hak adat, pemberdayaan komunitas, dan penerapan zonasi eksklusif untuk melindungi lingkungan pesisir. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini menghasilkan solusi kebijakan yang komprehensif guna mendukung keberlanjutan ruang hidup masyarakat Bajo.

Analisa dimulai dengan evaluasi kerangka hukum saat ini menggunakan metode *Hierarchical Theory Approach*, *Abstraction Approach*, dan *Empirical Legal Analysis* untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mengakomodasi hak-hak masyarakat Bajo dalam sistem hukum nasional berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan. Selain itu, analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam perlindungan ruang hidup masyarakat Bajo. Selanjutnya, eksplorasi dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi ketaatan masyarakat Bajo terhadap kebijakan berbasis RRRs berdasarkan hasil survei tatap muka dengan menerapkan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) guna menganalisis hubungan antar variabel yang memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Sebagai upaya memperdalam interpretasi, *Thematic Analysis* digunakan untuk memahami pola temuan kuantitatif dari hasil SEM dengan temuan kualitatif dari wawancara dengan masyarakat Bajo. Hasil analisis ini menjadi dasar perancangan desain proteksi ruang hidup masyarakat Bajo, yang tidak hanya mengakomodasi aspek hukum dan sosial budaya tetapi juga mempertimbangkan efektivitas kebijakan yang adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) digunakan untuk menilai dampak implementasi kebijakan desain proteksi yang dikembangkan. Pengembangan yang dimaksud dilakukan adaptasi dari *best-practice* model Internasional yang sudah berjalan dengan kondisi yang mirip dengan Masyarakat Bajo, yakni Funaya di Kota Ine, *perфекtur* Kyoto, Jepang. Kunjung lapangan dilakukan bertujuan untuk mempelajari bagaimana Funaya menggabungkan aspek pengakuan hak legal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan komunitas dalam satu kerangka kerja yang efektif untuk mengembangkan desain proteksi yang *sustainable* dalam kerangka kebijakan yang modern saat ini.

Temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa poin krusial terkait pengelolaan ruang hidup masyarakat Bajo di wilayah perairan. Pendekatan *top-down* yang kaku gagal mengakomodasi tradisi lokal masyarakat Bajo. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai lokal dengan kebijakan nasional. Pendekatan ini penting untuk memastikan keadilan sosial serta keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan hak legal yang disertai tanggung jawab kolektif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. Dalam implementasinya, penelitian mengusulkan kebijakan yang dibagi ke dalam tiga kluster utama. Pertama, kluster aplikatif yang mengedepankan pengakuan hak legal seperti Hak Atas Tanah (HAT). Kedua, kluster reformatif untuk menyesuaikan kebijakan pembatasan agar lebih responsif terhadap kondisi lokal masyarakat. Ketiga, kluster revolutif untuk menciptakan kebijakan baru dalam tata kelola sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini mengadaptasi elemen-elemen dari model Funaya di Jepang untuk konteks masyarakat Bajo. Elemen tersebut mencakup zonasi eksklusif serta perlindungan budaya lokal. Zonasi ruang kehidupan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



kemudian dibagi menjadi beberapa jenis, seperti zona konservasi, zona rentan, zona aktivitas ekonomi, zona eksklusif, dan zona terbuka. Zonasi ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat Bajo. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memberikan tanggung jawab langsung kepada masyarakat Bajo sebagai aktor utama dalam perlindungan wilayah pesisir. Keterlibatan aktif masyarakat akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penyederhanaan prosedur birokrasi turut diusulkan untuk mempercepat implementasi kebijakan. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan praktik terbaik internasional dari model Funaya Jepang, desain proteksi ini menjadi pedoman utama bagi Kementerian ATR/BPN. Pendekatan ini akan membantu mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bajo.

Kata Kunci: desain proteksi, funaya, RRRs, ruang kehidupan perairan, suku bajo

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

SUMMARY

ASNAEDI. Developing a Protection Framework for Coastal Community Living Spaces: Funaya-Japan Adaptation for the Bajo Tribe-Indonesia. Supervised by JOYO WINOTO, HARIANTO and LINDA KARLINA SARI.

The relationship between humans and nature has been an integral part of the lives of indigenous communities in Indonesia, including the Bajo people. As the largest archipelagic country, Indonesia possesses a rich diversity of cultures and local wisdom closely tied to marine ecosystems. The Bajo people are a tangible example of humans' adaptive relationship with their environment, living in dependence on the sea as their dwelling place and source of livelihood. Their lifestyle reflects adaptation, interaction, and the sustainable utilisation of marine resources. However, the rise of industrialisation and modernisation poses challenges to the management of the Bajo community's living spaces. Current national policies predominantly focus on terrestrial areas, neglecting their inherited local wisdom. Existing legal frameworks, including Article 33(3) and Article 27(2) of the 1945 Constitution, assert that natural resources are state property and are utilised for the prosperity of the people to ensure every citizen has access to employment and a decent livelihood. However, the implementation of such policies does not fully reflect alignment with the needs of indigenous communities residing in aquatic areas.

During the 1980s and 1990s, the government attempted to relocate the Bajo people to land through transmigration or resettlement programmes. This program were not entirely successful as they conflicted with their culture, creating risks of cultural identity loss, adaptation difficulties, and marginalisation. Top-down approaches without active community participation only incite resistance and a lack of ownership. In addressing these challenges, the sustainability of the Bajo people's aquatic living spaces becomes a primary hope or priority to preserve their cultural identity. Challenges include environmental degradation, vulnerability to natural disasters, and declining welfare. Policies that fail to align with their traditions and weak recognition of their rights as citizens residing in aquatic areas exacerbate their situation. A legal framework that is overly land-focused creates gaps in accommodating the sustainability of their living spaces. Without protection designs that accommodate their local wisdom, their living spaces remain threatened by exploitation.

This study aims to develop an adaptive, inclusive, and sustainable model for the protection and management of the Bajo community's coastal living space. To achieve this, the research integrates the Rights, Restrictions, and Responsibilities (RRRs) framework with the concepts of Adaptive Governance and Co-Management in coastal area management. This combined approach is designed to balance the recognition of the Bajo people's rights, the enforcement of restrictions necessary to protect marine ecosystems, and shared responsibilities among stakeholders. Specifically, the study seeks to: (1) analyse how national policies and regulations affect the recognition and protection of land rights for the Bajo community in marine areas; (2) evaluate the national legal framework related to RRRs and its impacts on compliance and the community's rights to reside and extract marine resources; and (3) develop a coastal living space protection design



for the Bajo community, adapting elements from Japan's Funaya model with an emphasis on formal recognition of customary rights, community empowerment, and exclusive zoning to protect coastal environments. Thus, the study aims to generate comprehensive policy solutions to support the sustainability of the Bajo community's coastal living spaces.

The analysis begins with an evaluation of the current legal framework using the Hierarchical Theory Approach, Abstraction Approach, and Empirical Legal Analysis to assess the extent to which existing regulations accommodate the rights of the Bajo people within the national legal system based on issued regulations. In addition, SWOT analysis is applied to identify strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in protecting the living space of the Bajo community. Next, an exploration is conducted to identify variables that influence the Bajo community's compliance with RRRs-based policies through face-to-face surveys and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to examine the relationships between variables affecting policy compliance. To deepen the interpretation, Thematic Analysis is employed to connect quantitative findings from SEM with qualitative findings from interviews with the Bajo community. These analyses serve as the foundation for designing a protection framework for the Bajo people's living space, which not only accommodates legal and socio-cultural aspects but also ensures that policies remain adaptive and inclusive. To assess the impact of the proposed policy implementation, the Regulatory Impact Assessment (RIA) method is employed. Furthermore, the proposed protection framework integrates best-practice international models that share similarities with the Bajo community's conditions, particularly the Funaya model in Ine Town, Kyoto Prefecture, Japan. A field study was conducted to examine how Funaya successfully integrates legal rights recognition, environmental preservation, and community empowerment into an effective governance framework. The insights gained from this study serve as a reference for designing a sustainable protection framework within modern policy structures.

Findings from this study highlight several critical points regarding the management of the Bajo community's coastal living space in marine areas. A rigid, top-down approach has proven ineffective in accommodating local traditions and practices. Therefore, harmonisation of policies that integrate local values with national regulations is essential for ensuring social justice and the sustainability of coastal management. Additionally, the research demonstrates that the recognition of legal rights, coupled with collective responsibilities, significantly enhances community compliance with regulations. To operationalise these findings, the study proposes policy strategies categorised into three main clusters: firstly, an applicative cluster emphasising legal rights recognition such as Land Rights (Hak Atas Tanah, HAT); secondly, a reformative cluster aimed at adjusting restrictive policies to better reflect local conditions; and thirdly, a revolutionary cluster focused on developing entirely new policies for sustainable coastal resource governance. Furthermore, the research adapts critical elements from Japan's Funaya model to the Bajo community context, including exclusive zoning and local cultural protection. The coastal living space zoning is categorised into conservation, vulnerable areas, economic activity zones, exclusive zones, and open zones, designed to holistically support ecological, social, and economic sustainability. The study underscores the importance of assigning direct responsibilities to the Bajo

community as primary actors in coastal protection. Active community participation is expected to enhance compliance with existing regulations significantly. Additionally, simplifying bureaucratic procedures is recommended to expedite policy implementation. By integrating local wisdom and international best practices, particularly from the Funaya model in Japan, this protection design serves as a critical reference for Indonesia's Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This approach aims to foster more equitable, inclusive, and sustainable coastal area management for the Bajo community.

Keywords: bajo tribe, coastal living spaces, funaya, protection design, RRRs

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**DESAIN PROTEKSI SISTEM RUANG KEHIDUPAN
MASYARAKAT PESISIR: ADAPTASI FUNAYA-JEPANG
BAGI SUKU BAJO-INDONESIA**

ASNAEDI

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Manajemen dan Bisnis

**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
2. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.

Anggota Promosi Luar Komisi pada Sidang Promosi Terbuka:

1. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
2. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Disertasi : Desain Proteksi Sistem Ruang Kehidupan Masyarakat Pesisir:
Adaptasi Funaya-Jepang bagi Suku Bajo-Indonesia
Nama : Asnaedi
NIM : K1601202050

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Joyo Winoto, Ph.D.



Digitally signed by:
Joyo Winoto

Date: 25 Mar 2025 12:20:48 WIB
Verify at design.ipb.ac.id

Pembimbing 2:
Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S.



Digitally signed by:
Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S.

Pembimbing 3:
Dr. Linda Karlina Sari, S.Stat, M.Si.



Digitally signed by:
Dr. Linda Karlina Sari, S.Stat, M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.
NIP 196009161986011001



Digitally signed by:
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.

Dekan Sekolah Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
NIP 196812291992031016



Digitally signed by:
Noer Azam Achsani
Date: 10 Apr 2025 13:05:51 WIB
Verify at design.ipb.ac.id

Tanggal Ujian Tertutup: 10 Februari 2025 Tanggal Lulus:
Tanggal Sidang Promosi Terbuka: 24 Februari 2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam ini ialah terkait dengan desain proteksi ruang kehidupan perairan, dengan judul “Desain Proteksi Sistem Ruang Kehidupan Masyarakat Pesisir: Adaptasi Funaya-Jepang Bagi Suku Bajo-Indonesia”. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga tercinta yang telah mendukung dan memberikan dukungan hingga selesainya disertasi ini. Selanjutnya kami selaku peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para pembimbing, Bapak Joyo Winoto, Ph.D., Bapak Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S., dan Ibu Dr. Linda Karlina Sari, S.Stat., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Penguji luar komisi Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S. dan Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. yang memberikan dukungan untuk kesempurnaan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen dan Bisnis.
4. Seluruh dan Segenap Jajaran di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah membantu dan bekerja sama dalam mendukung data dan memfasilitasi lapangan sehingga disertasi ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada moderator seminar, dan peserta seminar. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Februari 2025

Asnaedi
K1601202050

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR RUMUS	xvii
DAFTAR SINGKATAN/ GLOSARIUM	xix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
1.5 Ruang Lingkup	8
1.6 Kebaruan Penelitian	9
1.7 Hipotesis	10
II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Konseptual	38
III METODE	40
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	41
3.5 Tahapan Penelitian	43
3.6 Metode Analisis data	45
IV PENGARUH KEBIJAKAN DAN REGULASI NASIONAL TERHADAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT SUKU BAJO DI WILAYAH PERAIRAN	49
4.1 Suku Bajo dalam Ulasan Multidimensi	50
4.2 Peraturan dan Dampaknya terhadap Suku Bajo	57
4.3 Analisis SWOT Dampak Kerangka Hukum terhadap Suku Bajo	60
4.4 Potensi Peningkatan dengan Mengintegrasikan Praktik Terbaik Internasional	62
4.5 Hasil dan Diskusi	64
V PENGARUH KERANGKA <i>RIGHTS, RESTRICTIONS, AND RESPONSIBILITIES</i> (RRR) TERHADAP PEMENUHAN <i>BUNDLE OF RIGHT</i> DAN KEPATUHAN MASYARAKAT BAJO	67
5.1 Desain Penelitian dan Hipotesis	68
5.2 Hasil Pengumpulan Data Lapangan	74
5.3 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	77
5.4 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	80
5.5 Pengujian Hipotesis	80
5.6 Hasil dan Diskusi	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber ;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR ISI (LANJUTAN)

VI	PENGEMBANGAN DESAIN PROTEKSI RUANG KEHIDUPAN MASYARAKAT BAJO DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA: ADAPTASI FUNAYA	87
	6.1 Perumusan Masalah dan Tujuan	91
	6.2 Perumusan Alternatif Kebijakan	98
	6.3 Analisis Manfaat dan Biaya	104
	6.4 Strategi Implementasi	107
VII	KESIMPULAN DAN SARAN	109
	7.1 Kesimpulan	109
	7.2 Keterbatasan Penelitian	111
	7.3 Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	113
	RIWAYAT HIDUP	122

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

1	Hak-hak kepemilikan secara umum	15
2	Ketentuan hukum pada wilayah pesisir	28
3	Ringkasan penelitian terdahulu	35
4	Penentuan responden dalam penelitian	41
5	Tren penelitian terkait Suku Bajo berdasarkan tahun	50
6	Tren penelitian Suku Bajo dalam klasifikasi dan pengelompokan	51
7	Distribusi penelitian terkait Suku Bajo menurut Provinsi	51
8	Lokasi yang diteliti oleh peneliti lain	52
9	Peraturan perundang-undangan terkait	57
10	Matriks SWOT	61
11	Rumusan Hipotesis Penelitian	71
12	Hasil tematik analisis terkait dimensi Hak	75
13	Hasil tematik analisis terkait RRRs	76
14	Hasil wawancara terkait <i>Obedience</i>	77
15	Hasil pengukuran <i>outer model</i>	79
16	Nilai <i>R Square</i> (R^2)	80
17	Hasil uji model struktural dengan SEM-PLS	80
18	Efek mediasi pada <i>indirect effect</i>	83
19	Komparasi Funaya dan Suku Bajo	97
20	Analisis manfaat dan biaya untuk alternatif 1 (<i>Do Nothing</i>)	104
21	Analisis manfaat dan biaya untuk alternatif 2 (Zona dan Ruang)	105

DAFTAR GAMBAR

1	Kedudukan UUPA dalam sistem hukum nasional	17
2	Permukiman Suku Bajo di Pesisir	19
3	Tipe (1) hunian di atas Air	20
4	Tipe (2) hunian transisi (air dan darat)	20
5	Tipe (3) hunian di darat	21
6	Peta permukiman Suku Bajo di wilayah pesisir dengan struktur hunian di atas Laut Enggros (kiri), Tobati (kanan)	21
7	Peta permukiman Suku Bajo di wilayah Pesisir dengan struktur hunian di Atas Torosiaje (kiri), Bajo (kanan)	22
8	Peta permukiman terapung di Desa Tanjung Kelit dengan struktur hunian di Atas Laut	22
9	Funaya di Kota Ine, Kyoto, Jepang	23
10	Ruang di dalam Funaya, denah ruang perahu di lantai pertama dan rumah tinggal lantai kedua	24
11	Klasifikasi dan renovasi daripada Funaya	24
12	Funaya yang telah dilakukan renovasi (a) Guest House, (b) Cafe	25
13	Adaptasi dari Funaya	25
14	Klasifikasi pesisir berdasarkan <i>The Coastal Law</i>	26
15	Cakupan area hukum pesisir di Jepang	27
16	Hukum pesisir dan kementerian yang memiliki yuridiksi area pesisir	28
17	Kerangka konseptual penelitian	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



18	Peta permukiman Suku Bajo di wilayah pesisir desa Torosiaje (kiri), Desa Bajo (kanan)	40
19	Tahapan penelitian	44
20	Distribusi spasial lokasi (dibuat dengan Google Maps 2024)	53
21	Kerangka konseptual <i>mixed-method</i>	69
22	Diagram konseptual SEM	70
23	Distribusi tingkat kesetujuan responden terhadap indikator hak masyarakat Suku Bajo	74
24	Distribusi tingkat kesetujuan responden terhadap indikator RRRs	76
25	Distribusi tingkat kesetujuan responden terhadap indikator kepatuhan	77
26	Diagram konseptual penelitian	90
27	Pandangan kebijakan zona eksklusif masyarakat Suku Bajo	93
28	Pandangan masyarakat Suku Bajo: relokasi Suku Bajo ke daratan	94
29	Pandangan pemerintah, NGO, akademisi: relokasi Suku Bajo ke daratan	94
30	Penetapan zona ruang kehidupan masyarakat Bajo	100
31	Pengaturan desain proteksi masyarakat Bajo	102
32	Kerangka pengembangan desain proteksi dan ruang kehidupan masyarakat Bajo	106

DAFTAR RUMUS

1	Rumus slovin	42
---	--------------	----

DAFTAR SINGKATAN/ GLOSARIUM

Acc	: <i>Access</i>
Ali	: <i>Alienation</i>
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
AVE	: <i>Average Variance Extracted</i>
CBA	: <i>Cost-Benefit Analysis</i>
CR	: <i>Composite Reliability</i>
EFA	: <i>Exploratory Factor Analysis</i>
Exc	: <i>Exclusion</i>
FEMA	: <i>Federal Emergency Management Agency</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAT	: Hak Atas Tanah
HGU	: Hak Guna Usaha
HGB	: Hak Guna Bangunan
HM	: Hak Milik
HP	: Hak Pakai
Inacc	: <i>Information Accessibility</i>
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPRL	: Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
MAFF	: <i>Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries</i> (Jepang)
Mgm	: <i>Management</i>
MLIT	: <i>Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism</i> (Jepang)
MOJ	: <i>Ministry of Justice</i> (Jepang)
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PLS	: <i>Partial Least Squares</i>
Rest	: <i>Restriction</i> (Pembatasan)
RIA	: <i>Regulatory Impact Assessment</i>
RRRs	: <i>Rights, Restrictions, and Responsibilities</i>
SEM	: <i>Structural Equation Modeling</i>
SLR	: <i>Systematic Literature Review</i>
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
WNI	: Warga Negara Indonesia
With	: <i>Withdrawal</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.